

**EKSKLUSI PETANI AKIBAT ALIH FUNGSI TANAH
PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA
(Studi di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**Satria Eri Wibowo
NIM. 08172367**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Konsep Eksklusi Petani	9
2. Dinamika Wilayah Pinggiran Kota dan Alih Fungsi Tanah Pertanian	12
3. Struktur Agraria di Wilayah Pinggiran Kota	19
B. Kerangka Pemikiran	25
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	31
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah	36
B. Kecamatan Banguntapan	37
1. Letak, Luas dan Batas Administrasi	38
2. Penggunaan Tanah	39
C. Lokasi Penelitian Desa Banguntapan	40
1. Letak, Luas dan Batas Administrasi	41
2. Kependudukan	41

	3. Penggunaan Tanah	43
	4. Penguasaan Tanah Pertanian	45
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
	A. Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Tanah.....	
	Pertanian sebagai Gejala Eksklusi Petani	50
	1. Pertumbuhan Penduduk sebagai Gejala Eksklusi Petani	50
	2. Alih Fungsi Tanah Pertanian sebagai Gejala Eksklusi Petani.....	58
	B. Faktor Penyebab Eksklusi Petani	63
	1. Peraturan (<i>Regulation</i>).....	63
	2. Legitimasi (<i>Legitimation</i>).....	70
	3. Pasar (<i>Market</i>).....	81
	4. Paksaan (<i>Force</i>).....	84
	C. Dampak Alih Fungsi Tanah Pertanian terhadap Mata Pencapaian Petani Tereksklusi	88
	1. Diversifikasi Mata Pencapaian	91
	2. Bertahan di Sektor Pertanian	93
	3. Keluar dari Sektor Pertanian	94
	4. Kehilangan Mata Pencapaian	96
BAB VI.	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRACT

This research focuses on peasants exclusion for the effect of farming land conversion which objective to : (1) find out the inhabitant growth dynamics and farming land conversion. (2) find out the causal factor of peasants exclusion; and (3) find out the impact of farming land conversion towards the occupation of excluded peasants in Banguntapan village as the coastal area of Yogyakarta city. Spatial approach is used to explain peasants exclusion which is signed by inhabitant growth indication and farming land conversion. It is used to support the study of causal factor of peasants exclusion and the impact farming land conversion towards the occupation of excluded peasants. To reach the objective of the study based on the correlation with the object of the study is used interview method through purposive sampling towards excluded peasants and document study which supports qualitative analysis as the phenomenon happened.

This research which is carried out in Banguntapan village shows that : (1) farming land conversion dynamics which happen in one last decades, are affected by the high level of inhabitant growth, displacement of coastal area characteristic becomes urban area characteristic which is signed by the domination usage of yard/building land as the usage of rice field and field; (2) peasants exclusion is caused by : (a) the rule of development pressure which is made by goverment through RTRW and RDTRK; (b) the legitimation effect by development, modernity, civilization and environment; (c) the market organized as the importance of agrarian subject (goverment, private sector or society) by making demand and offering for farming land; (d) the force doesn't happen because of the security arrogancy, but indirectly, condition of "jammed in land" with the wide of farming land governance is getting narrow; (3) the impacts of farming land conversion towards the ocupation of excluded peasants are : (a) occupation diversification; (b) hold on the farming sector; (c) out of farming sector; (d) loss of occupation. The positif impact is enjoyed by exclusion peasants who can use the selling result of the farming land beneficiially to gain additional occupation in outside of farming sector. The negative impact is the decrease/the loss of income from farming sector and excluded peasants will release from social structure of peasants community.

Based on the research conclusion is gained some advices such as : (1) it is necessary to legitimate Banguntapan RDTRK by maintaining productive farming land, (2) it needs to coordinate agrarian subject in controlling physical development with priority scale, increase the education in farming sector and take care farming access; (3) it is necessary to coordinate agrarian subject in controlling the importance for continuing farming trade; (4) it needs in controlling farming land to avoid "jammed in land" and providing farming trade access.

Key words : conversion, exclusion, peasants

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia, sumber-sumber agraria merupakan faktor kehidupan yang vital, bukan hanya dalam arti ekonomi, namun juga mengandung arti sosial, politik, budaya dan bahkan mempunyai arti religius. Hal ini diperjelas dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria pada Bab I Pasal 1, butir (2) :

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”.

Tanah merupakan salah satu sumber agraria utama yang diperlukan dalam melaksanakan program pembangunan. Berbagai bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada saat ini, terutama pembangunan yang bersifat fisik, membutuhkan ketersediaan tanah. Tingginya tingkat kebutuhan atas tanah sebagai obyek agraria untuk keperluan pembangunan yang tidak sebanding dengan terbatasnya ketersediaan tanah menyebabkan konflik antar subyek agraria dalam struktur agraria terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pemenuhan kebutuhan akan tanah bagi suatu pembangunan oleh subyek agraria merupakan salah satu penyebab terjadinya dinamika perubahan penggunaan tanah pada suatu wilayah. Perubahan penggunaan tanah merupakan sebuah kenyataan yang harus terjadi akibat strategi pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan yang bersifat eksploitatif terutama di wilayah perkotaan. Hal ini juga disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berpengaruh antara lain pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi, perkembangan perkotaan ke daerah pinggiran dan perdesaan serta kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah setempat.

Pembangunan kota yang pesat menyebabkan bertambahnya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan sumber agraria (tanah). Kebutuhan akan tanah di kawasan perkotaan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya. Wilayah perkotaan tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan tanah untuk pembangunan, dengan luas tanah yang semakin berkurang menyebabkan harga tanah tinggi akibatnya terjadi proses *urban sprawl*, yaitu perluasan wilayah kota ke arah luar mendekati wilayah pinggiran, hal ini merupakan sebuah dinamika wilayah pinggiran kota.

Tingginya tingkat kebutuhan akan tanah di wilayah pinggiran kota yang tidak sebanding dengan terbatasnya ketersediaan tanah menyebabkan tanah pertanian menjadi “komoditas” yang diperebutkan oleh kepentingan antar subyek agraria (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam struktur agraria. Perubahan penguasaan dan kepemilikan tanah ditandai dengan peralihan hak,

disertai dengan perubahan penggunaan tanah terutama alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Kondisi ini berakibat hilang/lepasnya akses petani atas tanah pertaniannya.

Eksklusi petani merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dihadapi ketika laju alih fungsi tanah tidak dapat terkendali akibat strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang cepat. Eksklusi petani terjadi disebabkan oleh : (1) tekanan regulasi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah melalui RTRW; (2) legitimasi pengaruh pembangunan, kemodernan, keberadaban dan lingkungan; (3) pasar yang bekerja sebagai pengontrol kegiatan ekonomi yang dilakukan terhadap tanah dan manusia; (4) paksaan atau kekuatan terhadap petani yang membuat mereka terlepas dari tanah yang selama ini menghidupinya. Eksklusi petani berdampak langsung pada perubahan kehidupan/kesejahteraan petani dalam hal pilihan sumber mata pencaharian. Hilangnya akses petani terhadap tanah pertaniannya memaksa petani untuk memilih mata pencaharian utama di luar pertanian. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian untuk seluruh wilayah DIY pada kurun waktu 2000-2006 mencapai 648,114 ha atau rata-rata perubahannya 108,019 ha per tahun (Kanwil BPN DIY, 2007). Bahkan pada dekade 10 tahun terakhir, “Konversi tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata per tahun mencapai 200 Ha. Dua tahun terakhir ini

Bantul menjadi peringkat pertama yang banyak melakukan alih fungsi tanah. Peringkat kedua yang melakukan alih fungsi tanah adalah Kabupaten Sleman.” Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Republika, 2011). Alih fungsi tanah pertanian terutama banyak terjadi di wilayah pinggiran kota Yogyakarta. Keberadaan jalan lingkar (*ring road*) yang melingkari Kota Yogyakarta memberikan akses yang luar biasa terhadap tanah-tanah yang dahulu berupa tanah pertanian sawah beririgasi yang sangat produktif terutama di wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Hal ini berakibat pada meningkatnya alih fungsi tanah-tanah pertanian tersebut menjadi berbagai penggunaan non pertanian seperti kampus, gudang-gudang, pabrik, terminal, permukiman yang dikembangkan oleh investor dan pembangunan rumah dan pertokoan secara sporadis oleh masyarakat.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, 3 (tiga) di antara 17 (tujuh belas) kecamatan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan. Sejalan dengan fenomena perkembangan wilayah Kota Yogyakarta, alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bantul tidak bisa dihindari terutama di wilayah pinggiran kota. Hal ini disebabkan kawasan pinggiran kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Kebijakan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bantul. Pada peraturan daerah tersebut telah diatur fungsi-fungsi kawasan berdasarkan satuan wilayah pengembangan. Pengembangan kawasan tersebut meliputi kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan aglomerasi perkotaan, kawasan tumbuh cepat, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perbukitan dan kawasan pantai.

Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu wilayah pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, yaitu Desa Banguntapan, Desa Baturetno, Desa Potorono dan Desa Tamanan. Desa Banguntapan ditetapkan sebagai kawasan aglomerasi (perluasan atau pemekaran wilayah) perkotaan. Alih fungsi tanah di wilayah ini sangat tinggi, umumnya digunakan sebagai permukiman, industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya.

Alih fungsi tanah pertanian di Desa Banguntapan sebagai wilayah pinggiran kota memungkinkan terjadinya eksklusi petani dari tanah pertaniannya. Kondisi ini berdampak pada perubahan struktur agraria dan memaksa para petani yang tereksklusi di Desa Banguntapan untuk beralih mata pencaharian utama di luar pertanian. Fenomena ini berbanding terbalik dengan fisiografis wilayah yang mendukung pengembangan sektor pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Eksklusi Petani Akibat Alih Fungsi Tanah Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Yogyakarta, Studi di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan :

1. Bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk dan alih fungsi tanah pertanian?
2. Apa saja faktor penyebab eksklusi petani?
3. Bagaimana dampak alih fungsi tanah pertanian terhadap mata pencaharian petani tereksklusi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas, perlu dirumuskan beberapa tujuan penelitian yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan penduduk dan alih fungsi tanah pertanian di daerah penelitian;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab eksklusi petani di daerah penelitian;
3. Untuk mengetahui dampak alih fungsi tanah pertanian terhadap mata pencaharian petani tereksklusi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Kegunaan Akademis

Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Secara keilmuan, Penulis berharap penelitian eksklusi petani ini dapat menyumbangkan pengetahuan tentang terjadinya faktor penyebab

eksklusi petani akibat alih fungsi tanah pertanian serta dampaknya terhadap mata pencaharian petani tereksklusi.

2. Kegunaan Terapan

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran masalah terkait keterbatasan penguasaan tanah pertanian, alih fungsi tanah pertanian, eksklusi petani dan dampaknya terhadap mata pencaharian petani tereksklusi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat memunculkan kebijakan dalam pengembangan wilayah, menumbuhkan kesadaran bagi subjek agraria tentang perlunya mencegah dan mengatasi terjadinya eksklusi petani dengan memperhatikan masa depan petani bagi keberlanjutan usaha tani.

Kegunaan lainnya sebagai bahan masukan bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memperoleh tambahan wawasan, setidaknya mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan eksklusi petani akibat alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di daerah penulis bertugas.

E. Definisi Operasional

1. Eksklusi petani adalah hilang/lepasnya akses petani atas tanah pertaniannya akibat kebijakan pemerintah ataupun akibat interaksi petani dengan kelompok masyarakat lainnya.
2. Alih fungsi tanah pertanian adalah perubahan spesifik dari penggunaan tanah untuk pertanian menjadi non pertanian

3. Wilayah pinggiran kota adalah wilayah yang menunjukkan sifat dualistik, di satu sisi memang bersifat kedesaan, namun di sisi lain menunjukkan sifat kekotaan yang ditandai oleh pencampuran pemanfaatan tanah perkotaan atau kegiatan non agraris dan pemanfaatan tanah pedesaan yang berorientasi agraris.
4. Akibat langsung dari alih fungsi tanah pertanian adalah kondisi fisik tanahnya mengalami perubahan penggunaan tanah yang sebelumnya sawah dan tegalan menjadi penggunaan tanah non pertanian, sedangkan penguasaan tanahnya berakibat pada hilang/lepasnya akses petani atas tanah pertaniannya.
5. Dampak alih fungsi tanah pertanian salah satunya adalah perubahan mata pencaharian petani tereksklusi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinamika alih fungsi tanah pertanian di Desa Banguntapan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan memperlihatkan terjadinya pergeseran karakteristik wilayah pinggiran kota menjadi karakteristik wilayah perkotaan ditandai dengan dominasi penggunaan tanah pekarangan/bangunan atas penggunaan tanah pertanian.
2. Eksklusi petani yang terjadi di Desa Banguntapan secara terintegrasi disebabkan oleh 4 (empat) faktor :
 - a. Peraturan berupa kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banguntapan yang konsisten menetapkan Desa Banguntapan sebagai kawasan pengembangan kota.
 - b. Legitimasi berupa pengaruh : (1) pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya bangunan fisik; (2) kemodernan yang ditandai dengan menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian; dan (3) pengaruh lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim dan terbatasnya akses irigasi tanah pertanian.
 - c. Pasar berupa konflik kepentingan subjek agraria dengan menciptakan permintaan dan penawaran atas tanah pertanian yang selanjutnya beralih fungsi penggunaannya menjadi non pertanian.

Dominasi peran subjek agraria terhadap eksklusi petani di Desa Banguntapan : Masyarakat > Swasta > Pemerintah.

- d. Paksaan yang terjadi bukan karena arogansi aparat keamanan, namun secara tidak langsung berupa kondisi 'sawah kejeprit' dengan luas penguasaan tanah yang semakin sempit karena fragmentasi tanah pertanian oleh warisan.

Fakta yang ada memperlihatkan bahwa dominasi faktor penyebab eksklusi petani di Desa Banguntapan : paksaan > legitimasi > pasar > peraturan.

3. Hilang/lepasnya akses petani atas tanah pertaniannya merupakan akibat dari peralihan hak disertai alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Desa Banguntapan yang berdampak pada mata pencaharian petani tereksklusi yang meliputi :
 - a. Diversifikasi mata pencaharian, berupa lahirnya mata pencaharian tambahan di luar sektor pertanian yaitu sektor perdagangan, peternakan dan jasa;
 - b. Tetap bertahan di sektor pertanian, meskipun tidak mempunyai tanah pertanian, terjadi karena bekal keahlian/kemampuan di sektor pertanian yang melekat pada petani.
 - c. Keluar dari sektor pertanian, terjadi karena orientasi pemenuhan kebutuhan dari hasil usaha non pertanian lebih menjanjikan, yaitu sektor perdagangan, peternakan, wiraswasta dan jasa lainnya.

d. Hilangnya mata pencaharian, terjadi karena faktor usia yang telah lanjut, dengan tingkat pendidikan rendah sehingga tidak mampu lagi berkompetisi di luar sektor pertanian, sementara kehidupan sehari-hari telah ditanggung oleh anak-anaknya.

Dampak positif dirasakan oleh petani tereksklusi yang memiliki mata pencaharian tambahan dan mengembangkan kemampuan/keahlian di luar sektor pertanian dengan modal dari hasil penjualan tanah pertaniannya sehingga tercipta lapangan kerja baru di sektor perdagangan, swasta, peternakan dan jasa. Mereka yang masih bekerja di sektor pertanian dalam struktur sosial di masyarakat masih menjadi bagian dari komunitas petani.

Dampak negatif dirasakan oleh petani tereksklusi yang masih bekerja di sektor pertanian dengan menurunnya penghasilan dari sektor pertanian. Dampak negatif berupa terlepasnya dari struktur sosial masyarakat komunitas petani dirasakan oleh petani tereksklusi yang keluar dari sektor pertanian dan kehilangan mata pencaharian.

Berdasarkan dampak tersebut diperoleh klasifikasi eksklusi petani di Desa Banguntapan meliputi : (a) Petani yang Mengalami Gejala Eksklusi; (b) Petani yang Tereksklusi Sebagian; (c) Petani yang Tereksklusi Murni yang terbagi menjadi Petani Tereksklusi Murni Positif dan Petani Murni Tereksklusi Negatif.

B. Saran

1. Eksklusi petani di Desa Banguntapan sebagai wilayah pinggiran kota merupakan konsekuensi yang harus terjadi sehingga perlu diupayakan :
 - a. Penyusunan dan pengesahan RDTRK Kecamatan Banguntapan dengan mempertahankan tanah pertanian produktif yang tersisa dan memberikan insentif kepada petani.
 - b. Pembangunan fisik dengan skala prioritas dan terkontrol, pengembangan pendidikan sektor pertanian dan pelestarian lingkungan hidup dengan pemeliharaan saluran irigasi pertanian.
 - c. Koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkepentingan atas tanah dengan lebih memperhatikan eksistensi tanah pertanian produktif untuk keberlanjutan usaha tani.
 - d. Pengendalian tanah pertanian oleh para subjek agraria untuk menghindari lahirnya 'sawah kejeput' disertai dengan pemeliharaan dan penyediaan akses sarana produksi pertanian bagi petani.
2. Hilang/lepasnya akses petani atas tanah pertaniannya sedapat mungkin difasilitasi dengan menyediakan lapangan kerja padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi beban mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan ketrampilan dan jasa serta membuka peluang usaha industri rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Byrne, D. 2005. *Social Exclusion*. Maidenhead : Open University Press.
- Colby, Charles. (1933). “*Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography*” in *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 23.
- Hall, Derek, Phili Hirsch, and Tania Murray Li. (2011). “*Power of Exclusion : Land Dilemmas in South East Asia*”. National University of Singapore Press, Singapore.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 33.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang* . UU No. 26 Tahun 2007.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah* . PP No. 16 Tahun 2004.
- Isa, Iwan. (2006). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Makalah pada Seminar Multifungsi (Multifunctionality of Agriculture) di Bogor, 27-28 Juni 2006*. Balai Besar Sumberdaya Lahan (BBSDL), Ministry of Agriculture, Fisheries, and Forestry (MAFF) of Japan, dan ASEAN Secretariat. Bogor.
- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. (2007). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi masyarakat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Jayadinata, Johara T. (1992). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Koestoer, Raldi Hendro. (1999). *Perspektif Lingkungan Desa-Kota*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Rahardjanto. (2008). *Studi dan Agenda Reforma Agraria Abad 21 : Pengenalan dan Peninjauan*.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. (1991). *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Soetarto, Endriatmo dan Moh. Shohibuddin. (2004). *Reforma Agraria Prasyarat Utama bagi Revitalisasi Pertanian dan dan Pedesaan*. KPA, Bandung.
- Soetomo, Greg. (2001). *Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sudrio Suprianto, Bambang. (2009). *Modul Kuliah Politik Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sumardjono, S.W., Maria (2008). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta
- Sumaryanto, et. al. 2001. *Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian dan Dampak Negatifnya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Whennie, Sasfira. (2009). *Perubahan Struktur Agraria di Wilayah Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Cibahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya)*.
- Yunus, Hadi Sabari. (2001). *Perubahan Pemanfaatan Lahan di Daerah Pinggiran Kota : Kasus di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Disertasi. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.